



## **PENYERAPAN APBN PADA SATUAN PELAYANAN PEMENUHAN GIZI (SPPG) DALAM MENDUKUNG EFEKTIVITAS PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DI KEC HAMPARAN PERAK, DELI SERDANG**

**Yoan Paquita R.G, Renny Maisyarah**

Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

### **Abstrak**

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang bertujuan meningkatkan status gizi masyarakat, khususnya peserta didik, melalui penyediaan makanan bergizi secara berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki peran penting sebagai unit pelaksana yang mengelola dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penyerapan anggaran yang belum optimal dapat menghambat pelaksanaan kegiatan, memengaruhi kualitas pelayanan, serta mengurangi efektivitas pencapaian tujuan Program Makan Bergizi Gratis. Keberhasilan pelaksanaan program tidak hanya ditentukan oleh besarnya alokasi anggaran, tetapi juga oleh kemampuan SPPG dalam menyerap dan mengelola anggaran secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap pengelola SPPG serta pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai proses penyerapan anggaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat penyerapan APBN pada SPPG, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penyerapan anggaran, mengkaji kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran, serta merumuskan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas Program Makan Bergizi Gratis di Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kondisi penyerapan APBN pada SPPG, faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengelolaan anggaran, serta rekomendasi bagi pemerintah dan pengelola SPPG dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan kajian di bidang akuntansi sektor publik, pengelolaan keuangan negara, dan evaluasi program pemerintah.

**Kata Kunci:** Penyerapan APBN, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Program Makan Bergizi Gratis, Efektivitas Program, Pengelolaan Keuangan Negara.

## **PENDAHULUAN**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen utama pemerintah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. APBN berfungsi sebagai alat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan berbagai program dan layanan publik yang berkualitas. Penyerapan anggaran yang optimal mencerminkan kemampuan suatu instansi dalam melaksanakan program sesuai dengan perencanaan, sedangkan penyerapan anggaran yang rendah dapat menghambat pencapaian target pembangunan, menurunkan kualitas pelayanan publik, dan mengurangi efektivitas penggunaan keuangan negara. Salah satu indikator keberhasilan pengelolaan APBN adalah tingkat penyerapan anggaran.

Salah satu program strategis pemerintah yang didanai melalui APBN adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini bertujuan meningkatkan status gizi masyarakat, khususnya peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, sebagai bagian dari upaya pembangunan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif. Program ini juga diharapkan mampu menekan angka stunting, meningkatkan konsentrasi belajar peserta didik, serta mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berperan sebagai unit pelaksana yang bertanggung

jawab mengelola dana APBN, mulai dari perencanaan kegiatan, pengadaan bahan pangan, pengolahan dan distribusi makanan, hingga pelaporan serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Pengelolaan anggaran yang baik akan mendukung kelancaran penyediaan makanan bergizi sesuai dengan standar kualitas, jumlah sasaran, dan jadwal distribusi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, tingkat penyerapan APBN pada SPPG menjadi salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan pelaksanaan program.

Beberapa kendala yang umum terjadi meliputi keterlambatan pencairan anggaran, proses administrasi yang kompleks, keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan, perubahan kebijakan pemerintah, mekanisme pengadaan barang dan jasa, serta koordinasi yang belum optimal antarinstansi. Kondisi tersebut dapat menyebabkan rendahnya realisasi anggaran pada awal tahun, penumpukan belanja pada akhir tahun anggaran, bahkan berpotensi memengaruhi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, dalam praktiknya penyerapan APBN sering menghadapi berbagai tantangan.

Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, merupakan salah satu wilayah yang melaksanakan Program Makan Bergizi Gratis melalui SPPG. Pelaksanaan program di wilayah ini memerlukan pengelolaan APBN yang efektif agar seluruh sasaran penerima manfaat memperoleh pelayanan sesuai dengan tujuan program. Oleh karena itu,

evaluasi terhadap penyerapan APBN pada SPPG di Kecamatan Hamparan Perak menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana anggaran telah dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung efektivitas Program Makan Bergizi Gratis. Selain itu, penelitian mengenai penyerapan APBN pada SPPG masih relatif terbatas mengingat Program Makan Bergizi Gratis merupakan program yang baru diimplementasikan secara nasional. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak membahas penyerapan anggaran pada pemerintah daerah, kementerian/lembaga, atau organisasi perangkat daerah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam memperkaya kajian mengenai pengelolaan keuangan negara pada unit pelaksana Program Makan Bergizi Gratis, khususnya SPPG.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana penyerapan APBN pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), faktor-faktor yang memengaruhi proses penyerapan anggaran, berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas Program Makan Bergizi Gratis di Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pengelola SPPG, pemerintah pusat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan kualitas tata kelola anggaran sehingga tujuan Program Makan Bergizi Gratis dapat tercapai secara optimal, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

#### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana proses pengelolaan dan pelaksanaan penyerapan APBN pada Satuan

Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis di Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang?

2. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi penyerapan APBN pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang?

3. Apa saja kendala yang dihadapi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam penyerapan APBN untuk pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang?

4. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penyerapan APBN sehingga pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kecamatan Hamparan Perak menjadi lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel?

#### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui proses pengelolaan dan pelaksanaan penyerapan APBN pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis di Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang

2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penyerapan APBN pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

3. Untuk menganalisis berbagai kendala yang dihadapi dalam proses penyerapan APBN pada SPPG di Kecamatan Hamparan Perak

4. Untuk merumuskan rekomendasi atau strategi untuk meningkatkan penyerapan APBN sehingga pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis menjadi lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

## METODE PENELITIAN

### Jenis dan Sumber Penelitian

**Jenis Penelitian :** Penelitian ini menggunakan **pendekatan kuantitatif** dengan jenis penelitian **deskriptif asosiatif**. Pendekatan kuantitatif digunakan karena penelitian bertujuan menguji pengaruh penyerapan APBN pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terhadap efektivitas Sementara itu, penelitian asosiatif bertujuan menganalisis hubungan atau pengaruh antara variabel independen, yaitu penyerapan APBN, dengan variabel dependen, yaitu efektivitas Program Makan Bergizi Gratis.

### Sumber Penelitian :

- Data primer: hasil wawancara dan kuesioner dengan staff SPPG di Kec. Hamparan Perak.
- Data sekunder: Laporan Keuangan, Data Jumlah Penerima Manfaat, Juknis, Peraturan Perundang-undangan mengenai tata kelola APBN dan Keuangan Negara dan Jurnal Ilmiah.

### Tempat dan Waktu Penelitian

**Tempat Penelitian :** Penelitian dilakukan di beberapa kantor Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kec. Hamparan Perak

### Waktu Penelitian :

Dilaksanakan pada Juni 2026

### Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

#### Jenis Data :

Jenis data yang digunakan adalah **mixed methods** yaitu penggabungan antara pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Data Kuantitatif merupakan data yang berbentuk angka atau bilangan yang dapat diukur, dihitung, dan dianalisis menggunakan metode statistik. Data Kualitatif adalah data yang berbentuk deskripsi, kata-kata, pendapat, perilaku, atau informasi nonangka yang digunakan

untuk memahami suatu fenomena secara mendalam.

### Teknik Pengumpulan Data

#### 1. Wawancara

Melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang berwenang untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program.

#### 2. Kuesioner

Melakukan penyebaran daftar pertanyaan kepada responden untuk memperoleh data mengenai penyerapan APBN dan efektivitas Program Makan Bergizi Gratis.

#### 3. Dokumentasi

Diperoleh dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penyerapan APBN, laporan keuangan, serta laporan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Proses Pengelolaan dan Pelaksanaan Penyerapan APBN pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)

Dalam proses pengelolaan dan penyerapan APBN pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Hamparan Perak telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan pengelolaan keuangan negara, yaitu perencanaan, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban. Seluruh tahapan tersebut dilaksanakan untuk mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat sasaran. proses pengelolaan

dan penyerapan APBN pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Hampan Perak telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan pengelolaan keuangan negara, yaitu perencanaan, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban. Seluruh tahapan tersebut dilaksanakan untuk mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat sasaran.

Tahap pelaksanaan anggaran dimulai setelah dana APBN dialokasikan kepada SPPG sesuai mekanisme yang berlaku. Dana digunakan untuk pengadaan bahan makanan bergizi, pembayaran tenaga pelaksana, pengadaan peralatan pendukung, biaya distribusi, dan kebutuhan operasional lainnya. Seluruh pengeluaran dilakukan berdasarkan rencana kerja dan anggaran yang telah disusun sebelumnya. Tahap perencanaan, SPPG menyusun kebutuhan anggaran berdasarkan jumlah penerima manfaat, kebutuhan bahan pangan, biaya operasional, serta kebutuhan distribusi makanan. Penyusunan anggaran dilakukan dengan memperhatikan pedoman teknis yang telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga penggunaan APBN dapat diarahkan pada kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan program.

Dalam pelaksanaan program, penatausahaan keuangan dilakukan melalui pencatatan seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran anggaran. Setiap penggunaan dana didukung dengan dokumen administrasi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah. Selanjutnya, SPPG menyusun laporan realisasi anggaran secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas penggunaan APBN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengelolaan APBN telah berjalan sesuai prosedur, namun masih ditemukan

beberapa kendala yang memengaruhi optimalisasi penyerapan anggaran.

2. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi penyerapan APBN pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Hampan Perak, Kabupaten Deli Serdang?

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dengan Kepala SPPG, bendahara, staf pengelola keuangan, dan tim pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta analisis terhadap dokumen pelaksanaan anggaran, diketahui bahwa terdapat beberapa faktor yang memengaruhi penyerapan APBN pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Hampan Perak. Faktor-faktor tersebut meliputi aspek perencanaan, administrasi, sumber daya manusia, pengadaan barang dan jasa, pengawasan, serta kondisi eksternal.

a. Perencanaan Anggaran

Perencanaan anggaran merupakan faktor utama yang memengaruhi tingkat penyerapan APBN. Penyusunan rencana kebutuhan yang dilakukan secara tepat berdasarkan jumlah penerima manfaat, kebutuhan bahan pangan, jadwal distribusi, dan biaya operasional akan memperlancar pelaksanaan kegiatan. Sebaliknya, apabila terjadi perubahan jumlah penerima manfaat, perubahan harga bahan pangan, atau perubahan kebijakan selama tahun anggaran, maka diperlukan revisi perencanaan yang dapat menyebabkan keterlambatan realisasi anggaran. Oleh karena itu, kualitas perencanaan sangat menentukan keberhasilan penyerapan APBN.

b. Proses Administrasi dan Pencairan Dana

Kelancaran proses administrasi dan pencairan dana menjadi faktor penting dalam mendukung penyerapan APBN. Setiap tahapan penggunaan anggaran harus memenuhi persyaratan

administrasi yang telah ditetapkan, mulai dari penyusunan dokumen, proses verifikasi, hingga pencairan dana.

c. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi sumber daya manusia yang mengelola anggaran berpengaruh terhadap ketepatan dan kecepatan penyerapan APBN. Pegawai yang memahami regulasi pengelolaan keuangan negara, tata cara penyusunan laporan, dan mekanisme pertanggungjawaban mampu melaksanakan administrasi anggaran dengan lebih efektif. Sebaliknya, keterbatasan pengalaman, kurangnya pelatihan, atau belum optimalnya pemahaman terhadap sistem pengelolaan keuangan dapat menghambat proses administrasi dan memperlambat penyerapan anggaran.

d. Pengadaan Barang dan Jasa

Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis memerlukan pengadaan bahan pangan dan perlengkapan operasional secara berkelanjutan. Proses pengadaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan memerlukan tahapan perencanaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, hingga pembayaran.

Kendala seperti keterlambatan pengiriman bahan pangan, keterbatasan pemasok, atau perubahan harga pasar dapat memengaruhi realisasi penggunaan anggaran. Oleh karena itu, sistem pengadaan yang efisien sangat mendukung optimalisasi penyerapan APBN.

e. Sistem Pengawasan dan Monitoring

Pengawasan internal dan monitoring yang dilakukan secara berkala berfungsi memastikan bahwa penggunaan APBN sesuai dengan ketentuan, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui monitoring yang berkelanjutan, kendala

dalam pelaksanaan program dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti. Dengan demikian, proses penyerapan anggaran dapat berjalan lebih efektif dan risiko penyimpangan dapat diminimalkan.

f. Faktor Eksternal

Selain faktor internal, terdapat faktor eksternal yang turut memengaruhi penyerapan APBN pada SPPG, antara lain perubahan kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi, inflasi, fluktuasi harga bahan pangan, serta gangguan distribusi akibat kondisi cuaca atau hambatan transportasi. Perubahan-perubahan tersebut dapat menyebabkan penyesuaian terhadap pelaksanaan kegiatan maupun penggunaan anggaran sehingga memengaruhi tingkat realisasi APBN.

3. Kendala yang dihadapi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam penyerapan APBN untuk pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kecamatan Hampan Perak, Kabupaten Deli Serdang

a. Keterlambatan Proses Administrasi dan Pencairan Anggaran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu kendala utama dalam penyerapan APBN adalah proses administrasi yang memerlukan tahapan verifikasi dan persetujuan sesuai ketentuan pengelolaan keuangan negara. Penyusunan dokumen administrasi, proses pemeriksaan, dan pencairan dana membutuhkan waktu sehingga realisasi anggaran tidak selalu dapat dilakukan sesuai jadwal yang telah direncanakan.

Kondisi tersebut berdampak pada keterlambatan pelaksanaan beberapa kegiatan operasional, terutama pada awal periode anggaran, sehingga pengelola SPPG harus melakukan penyesuaian terhadap jadwal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

b. Keterbatasan Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kendala berikutnya adalah masih adanya keterbatasan kompetensi sebagian pegawai dalam pengelolaan administrasi keuangan negara. Pengelolaan APBN memerlukan pemahaman mengenai penyusunan dokumen anggaran, pelaporan keuangan, serta mekanisme pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kebutuhan akan pelatihan dan pendampingan teknis masih cukup tinggi, terutama karena Program Makan Bergizi Gratis merupakan program yang relatif baru sehingga membutuhkan penyesuaian dalam pelaksanaannya.

c. Pengadaan Bahan Pangan dan Perubahan Harga

Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis sangat bergantung pada ketersediaan bahan pangan yang berkualitas dan memenuhi standar gizi. Dalam pelaksanaannya, pengadaan bahan pangan menghadapi tantangan berupa perubahan harga pasar, keterlambatan pasokan dari penyedia, serta keterbatasan ketersediaan beberapa komoditas pada waktu tertentu.

Perubahan harga bahan pangan menyebabkan perlunya penyesuaian penggunaan anggaran agar kebutuhan program tetap dapat dipenuhi tanpa mengurangi kualitas makanan yang diberikan kepada penerima manfaat.

d. Perubahan Kebijakan dan Penyesuaian Pelaksanaan Program

Program Makan Bergizi Gratis merupakan program yang terus berkembang sehingga terdapat penyesuaian terhadap pedoman teknis maupun mekanisme pelaksanaan. Perubahan kebijakan tersebut mengharuskan SPPG melakukan penyesuaian terhadap perencanaan kegiatan dan penggunaan anggaran. Penyesuaian tersebut memerlukan waktu sehingga pada beberapa

kesempatan dapat memengaruhi kecepatan realisasi anggaran.

e. Sistem Pengawasan dan Pertanggungjawaban

Sebagai program yang dibiayai oleh APBN, seluruh penggunaan anggaran harus memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, setiap transaksi harus didukung oleh dokumen pertanggungjawaban yang lengkap.

Meskipun sistem pengawasan penting untuk menjaga akuntabilitas penggunaan APBN, proses penyusunan dokumen pertanggungjawaban yang cukup rinci memerlukan ketelitian dan waktu sehingga menjadi salah satu tantangan dalam pengelolaan anggaran.

4. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penyerapan APBN sehingga pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kecamatan Hampan Perak menjadi lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel

Peningkatan penyerapan APBN memerlukan perbaikan pada aspek perencanaan, pelaksanaan anggaran, koordinasi, sumber daya manusia, pengawasan, dan sistem pelaporan. Upaya-upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBN di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

a) Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia

Pengelolaan APBN memerlukan aparatur yang memahami regulasi keuangan negara, administrasi anggaran, serta mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan secara berkala menjadi salah satu upaya yang penting.

Dengan meningkatnya kompetensi pegawai, proses penyusunan dokumen keuangan, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan dapat dilakukan secara lebih cepat, tepat, dan sesuai ketentuan.

b) Penguatan Koordinasi Antarinstansi

Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti SPPG, pemerintah daerah, satuan pendidikan, penyedia bahan pangan, dan instansi terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi yang efektif mempercepat penyelesaian permasalahan administratif maupun operasional.

Melalui koordinasi yang baik, proses pengadaan bahan pangan, distribusi makanan, pelaporan kegiatan, dan penggunaan anggaran dapat berjalan lebih lancar sehingga realisasi APBN dapat meningkat.

c) Meningkatkan Kualitas Perencanaan Anggaran

Penyusunan anggaran perlu didasarkan pada data jumlah penerima manfaat, kebutuhan bahan pangan, jadwal distribusi, serta estimasi biaya operasional yang akurat. Perencanaan yang baik akan mengurangi kebutuhan revisi anggaran selama pelaksanaan program sehingga proses penyerapan APBN dapat berjalan lebih tepat waktu dan sesuai target yang telah ditetapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan anggaran yang matang merupakan langkah awal untuk meningkatkan penyerapan APBN.

d) Penguatan Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi secara berkala diperlukan untuk mengetahui perkembangan realisasi anggaran serta mengidentifikasi kendala yang muncul selama pelaksanaan program.

Hasil evaluasi dapat digunakan sebagai dasar dalam melakukan perbaikan terhadap perencanaan

maupun pelaksanaan anggaran sehingga target penyerapan APBN dapat tercapai secara optimal.

e) Optimalisasi Sistem Pengadaan Barang dan Jasa

Kelancaran pengadaan bahan pangan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Oleh karena itu, proses pengadaan perlu direncanakan sejak awal dengan memperhatikan jadwal pelaksanaan program, kebutuhan riil di lapangan, serta ketersediaan penyedia barang yang memenuhi standar kualitas.

Perencanaan pengadaan yang baik dapat mengurangi keterlambatan distribusi bahan pangan sekaligus mempercepat realisasi penggunaan anggaran.

f) Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan sistem informasi dalam pengelolaan keuangan dapat membantu mempercepat proses administrasi, pencatatan transaksi, penyusunan laporan, dan monitoring realisasi anggaran. Digitalisasi administrasi juga dapat mengurangi kesalahan pencatatan, meningkatkan efisiensi kerja, serta mempermudah proses pengawasan terhadap penggunaan APBN.

## KESIMPULAN

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program strategis pemerintah yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dalam pelaksanaannya, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki peran yang sangat penting sebagai unit pelaksana yang bertanggung jawab dalam mengelola dan menyerap anggaran secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel agar tujuan program dapat tercapai secara optimal.

Penyerapan APBN yang optimal menjadi salah satu indikator keberhasilan pengelolaan keuangan negara karena berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan, ketepatan waktu distribusi makanan bergizi, kualitas pelayanan, serta pencapaian sasaran Program Makan Bergizi Gratis. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai faktor yang memengaruhi penyerapan anggaran, seperti kualitas perencanaan, kompetensi sumber daya manusia, proses administrasi, pengadaan barang dan jasa, koordinasi antarinstansi, serta sistem pengawasan. Selain itu, berbagai kendala seperti keterlambatan pencairan anggaran, perubahan harga bahan pangan, dan dinamika pelaksanaan program juga berpotensi memengaruhi efektivitas penggunaan APBN.

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai proses pengelolaan dan penyerapan APBN pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Hampan Perak, Kabupaten Deli Serdang, faktor-faktor yang memengaruhi penyerapan anggaran, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan APBN. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pengelola SPPG, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Dengan demikian, penelitian mengenai **Penyerapan APBN pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Mendukung Efektivitas Program Makan Bergizi Gratis di Kecamatan Hampan Perak, Kabupaten Deli Serdang** diharapkan

dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu akuntansi sektor publik, khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan negara, serta menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi peningkatan tata kelola anggaran pemerintah sehingga tujuan Program Makan Bergizi Gratis dapat tercapai secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Dewi, V. R. (2022). ANALISIS REALISASI ANGGARAN BELANJA TA 2019 SD 2021 UNTUK MENGUKUR EFISIENSI PENYERAPAN ANGGARAN DI KPPN TEGAL.

Suhipna, D. (2013). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA PENYERAPAN ANGGARAN DI WILAYAH KERJA KPPN SRAGEN. *Explorasi*, 25(2).

Setyawan, A. (2017). *Analisis keterlambatan penyerapan anggaran belanja satuan kerja kementerian/lembaga di wilayah pembayaran KPPN Bojonegoro tahun anggaran 2015* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).

Saepuloh, S., & Hilmi, F. (2026). MBG (Makan Bergizi Gratis) sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Lokal: Analisis Model SPPG dan Tantangan Tata Kelola Publik. *Ekalaya: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 4(1), 10-21.

Andriani, D., & Hasanah, U. (2021). Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Penyerapan Anggaran Pemerintah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 13(2), 95-108.

Halim, A., & Abdullah, S. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran pada Instansi Pemerintah. *Jurnal Akuntansi Publik*, 8(1), 45-59.

Kurniawan, R. (2022). Efektivitas Pengelolaan Anggaran dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi Sektor Publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 120-134.

Prasetyo, A., & Lestari, N. (2023). Analisis Penyerapan Anggaran dan Kinerja Pelaksanaan APBN pada Instansi Pemerintah.

*Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 14(1), 55-70.

Sari, M., & Yuliana, D. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara dalam Meningkatkan Efektivitas Program Pemerintah. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 11(1), 35-49.

Republik Indonesia. (2004). **Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.**

Republik Indonesia. (2005). **Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.**

Republik Indonesia. (2019). **Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.**